JURNAL AKUNTANSI NERACA
e-ISSN : 2987- 1352
Volume 3, No. 1, Tahun 2026
https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index

Pengaruh Tingkat Fleksibilitas Keuangan BLUD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang

Jefri Hariono[1], Herlina Helmy Klau[2], Miptaqul Rohmah[3], Clara Devy Yulvia Ratna Sary[4]

[1] *Universitas Al Qolam Malang, Indonesian*
[2] *Universitas Nusa Cendana, Indonesian*
[3,4] *Universitas Pawyatan Daha, Indonesian*

Corresponding Author
Nama Penulis: Jefri Hariono
E-mail: harionojeefri@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan pada Puskesmas. Fleksibilitas keuangan dan belanja modal menjadi instrumen penting dalam menyediakan sumber daya serta meningkatkan kapasitas operasional pelayanan, tetapi peningkatan realisasi anggaran belum tentu secara langsung mencerminkan peningkatan kinerja pelayanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan fleksibilitas keuangan BLUD dan belanja modal dengan kinerja operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif/eksplanatori dan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2022 dan 2023. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling berdasarkan data yang relevan, lengkap, berasal dari dokumen resmi, dan dapat dibandingkan antarperiode. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-komparatif dan rasio keuangan. Variabel penelitian meliputi fleksibilitas keuangan BLUD, belanja modal, dan kinerja operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja modal meningkat dari Rp11 juta pada 2022 menjadi Rp57,95 juta pada 2023, nilai peralatan dan mesin meningkat, serta defisit operasional menurun sebesar 68,59%. Namun, Puskesmas masih mengalami defisit dan peningkatan investasi aset diikuti kenaikan beban penyusutan. Penelitian berkontribusi dengan menegaskan pentingnya menghubungkan pengelolaan keuangan dan investasi aset dengan manfaat pelayanan publik, bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran.

Kata kunci - *belanja modal, fleksibilitas keuangan, kinerja operasional, Puskesmas, pelayanan kesehatan*

Abstract

Financial management of Regional Public Service Agencies (BLUD) plays an important role in supporting the effectiveness and sustainability of health services at public health centers. Financial flexibility and capital expenditure are important instruments for providing resources and improving operational service capacity; however, increased budget realization does not necessarily reflect improved service performance. This study aims to analyze the relationship between BLUD financial flexibility, capital expenditure, and operational performance of health services at Rampal Celaket Public Health Center, Malang City. This study employed a quantitative approach with an associative/explanatory research design using secondary data from the 2022 and 2023 financial reports. The sample was determined using purposive sampling based on relevant, complete, officially documented, and comparable data between periods. Data were collected through documentation and literature studies and

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

analyzed using descriptive-comparative analysis and financial ratios. The research variables consisted of BLUD financial flexibility, capital expenditure, and operational performance. The findings show that capital expenditure increased from IDR 11 million in 2022 to IDR 57.95 million in 2023, while the value of equipment and machinery increased and the operational deficit decreased by 68.59%. However, the health center remained in an operational deficit, and increased asset investment was accompanied by higher depreciation expenses. This study contributes by emphasizing the importance of linking financial management and asset investment with public service benefits rather than merely budget absorption.

Keywords - *capital expenditure, financial flexibility, health services, operational performance, public health center*

How to Cite : *Hariono, J., Klau, H. H., Rohmah, M., & Sary, C. D. Y. R. (2026). Pengaruh Tingkat Fleksibilitas Keuangan BLUD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang. Jurnal Akuntansi Neraca, 3(1), 12 - 22. https://doi.org/10.59837/jan.v4i1.1122*

Copyright *©2026 Jefri Hariono, Herlina Helmy Klau, Miptaqul Rohmah, Clara Devy Yulvia Ratna Sary*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pemeriksaan dan pengobatan, tetapi juga sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, kualitas pelayanan Puskesmas berkaitan erat dengan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, anggaran, obat-obatan, peralatan medis, dan sarana pendukung secara efektif. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 menegaskan bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga perlu diarahkan pada pencapaian hasil operasional yang mendukung mutu, efektivitas, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.

Salah satu pendekatan pengelolaan keuangan yang diterapkan pada fasilitas pelayanan publik adalah pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas. Fleksibilitas tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi unit pelayanan dalam merespons kebutuhan operasional secara lebih cepat, tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dalam perspektif New Public Management, orientasi pengelolaan organisasi publik perlu menekankan hasil, efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur administratif (Hood, 1991). Dengan demikian, fleksibilitas keuangan BLUD relevan untuk dikaji sebagai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi kemampuan Puskesmas dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fleksibilitas keuangan dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan unit pelayanan untuk memanfaatkan sumber daya keuangannya sesuai kebutuhan operasional, ruang kewenangan yang dimiliki, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas tersebut berpotensi membantu manajemen memenuhi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai, membiayai pemeliharaan peralatan, mendukung kegiatan pelayanan, serta menyesuaikan alokasi sumber daya ketika terjadi perubahan kebutuhan masyarakat. Namun, fleksibilitas tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja. Dampaknya bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan pengambilan keputusan, pengendalian internal, dan kemampuan manajemen menghubungkan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

penggunaan anggaran dengan target pelayanan. Hal ini sejalan dengan pemikiran public value yang menempatkan penciptaan manfaat bagi masyarakat sebagai orientasi penting dalam penyelenggaraan organisasi publik (Moore, 1995). Oleh karena itu, hubungan fleksibilitas keuangan dan kinerja operasional perlu diuji secara empiris, khususnya pada organisasi pelayanan kesehatan yang menghadapi kebutuhan operasional yang dinamis.

Selain fleksibilitas keuangan, belanja modal merupakan komponen penting yang dapat mendukung kapasitas pelayanan kesehatan. Belanja modal digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti peralatan dan mesin, fasilitas pelayanan, serta infrastruktur penunjang. Pada Puskesmas, ketersediaan peralatan medis, perangkat laboratorium, dan fasilitas pendukung yang memadai berpotensi meningkatkan kapasitas pemeriksaan, memperlancar proses pelayanan, dan mendukung ketepatan pelaksanaan prosedur kesehatan. Namun, besarnya belanja modal tidak selalu mencerminkan peningkatan kinerja operasional apabila aset yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan, kurang dimanfaatkan, atau tidak disertai pemeliharaan yang memadai. Perspektif manajemen keuangan publik menekankan pentingnya pengalokasian sumber daya berdasarkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, termasuk mempertimbangkan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, belanja modal perlu dipahami bukan sekadar sebagai pengeluaran investasi, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelayanan kesehatan.

Fenomena empiris pada Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang memperlihatkan relevansi pengujian kedua faktor tersebut. Berdasarkan Laporan Keuangan Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang Tahun 2023 dan 2022, realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 mencapai Rp1.090.821.330,30 dari anggaran Rp1.251.870.735,15 atau sekitar 87,14%. Pada periode yang sama, realisasi belanja mencapai Rp1.516.160.554,00 dari anggaran Rp1.734.729.877,00 atau 87,40%. Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp57.947.635,00 dari anggaran Rp58.744.135,00 atau 98,64%, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp11.000.000,00. Data tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja modal pada 2023 relatif tinggi dan nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, data realisasi anggaran saja belum cukup untuk memastikan apakah peningkatan belanja modal tersebut diikuti oleh peningkatan kinerja operasional pelayanan kesehatan.

Permasalahan tersebut semakin penting apabila dilihat dari laporan operasional Puskesmas Rampal Celaket. Pada 2023, total pendapatan operasional tercatat sebesar Rp1.975.320.969,30, sedangkan total beban operasional mencapai Rp2.420.614.306,41 sehingga menghasilkan defisit operasional sebesar Rp445.293.337,11. Pada 2022, defisit operasional tercatat sebesar Rp1.417.963.078,20. Meskipun defisit pada 2023 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penilaian kinerja tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya pendapatan atau tingkat realisasi belanja. Laporan keuangan yang sama juga mencatat peningkatan nilai peralatan dan mesin dari Rp527.445.313,00 pada 2022 menjadi Rp1.000.825.070,00 pada 2023, sementara beban penyusutan aset tetap meningkat dari Rp98.029.880,22 menjadi Rp194.926.469,01. Angka-angka ini menjadi indikasi penting untuk mengkaji keterkaitan pengelolaan keuangan, investasi aset, dan keberlanjutan operasional, tetapi belum membuktikan hubungan sebab-akibat ataupun menunjukkan secara langsung perubahan mutu pelayanan kepada pasien.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif/eksplanatori, yang bertujuan menganalisis hubungan dan pengaruh fleksibilitas keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan belanja modal terhadap kinerja operasional pelayanan kesehatan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena variabel penelitian dapat diukur menggunakan data numerik yang bersumber dari laporan keuangan Puskesmas. Penelitian diarahkan untuk menguji

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

secara empiris apakah kemampuan Puskesmas dalam memanfaatkan fleksibilitas keuangan BLUD dan realisasi belanja modal berkaitan dengan pencapaian kinerja operasional. Penggunaan pendekatan ini sejalan dengan Creswell dan Creswell (2018), yang menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel melalui pengukuran dan analisis data numerik.

Lokasi penelitian adalah Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang, yang menjadi objek penelitian karena menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Waktu penelitian menggunakan periode data tahun 2022 dan 2023, sesuai dengan laporan keuangan yang menjadi sumber utama penelitian. Data tersebut mencakup informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, belanja modal, aset tetap, pendapatan operasional, beban operasional, serta surplus atau defisit operasional. Penggunaan periode tersebut memungkinkan peneliti membandingkan perubahan kondisi keuangan dan operasional Puskesmas dari tahun 2022 ke tahun 2023. Laporan keuangan menunjukkan, antara lain, bahwa realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp57.947.635,00 atau 98,64% dari anggaran, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp11.000.000,00.

Populasi penelitian dalam konteks data dokumenter adalah seluruh informasi keuangan dan operasional yang terdapat dalam dokumen pengelolaan keuangan Puskesmas Rampal Celaket. Sampel penelitian ditentukan berdasarkan data yang relevan dengan variabel penelitian, yaitu data fleksibilitas keuangan BLUD, belanja modal, dan kinerja operasional pada periode penelitian. Teknik pemilihan data menggunakan purposive sampling, dengan kriteria bahwa data yang digunakan harus berkaitan langsung dengan variabel penelitian, tersedia secara lengkap, berasal dari dokumen resmi Puskesmas, dan dapat dibandingkan antarperiode. Apabila penelitian kemudian dikembangkan menggunakan survei kepada pengelola BLUD, responden dapat dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan dan operasional Puskesmas. Namun, dokumen artikel yang tersedia belum mencantumkan jumlah responden survei sehingga jumlah sampel responden tidak dapat ditentukan tanpa data penelitian tambahan.

Sumber data penelitian terutama berupa data sekunder, yaitu laporan keuangan Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang tahun 2022 dan 2023. Dokumen yang digunakan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, belanja modal, nilai aset tetap, beban penyusutan, pendapatan operasional, dan beban operasional. Penggunaan laporan keuangan sebagai sumber data utama sesuai dengan karakter penelitian karena variabel yang dianalisis memiliki dimensi keuangan yang harus diukur berdasarkan data aktual. Laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi Puskesmas yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengolah data yang terdapat dalam laporan keuangan Puskesmas. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam tabel berdasarkan variabel penelitian sehingga dapat dilakukan perbandingan antarperiode. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, artikel jurnal, dan peraturan yang berkaitan dengan BLUD, fleksibilitas keuangan, belanja modal, manajemen keuangan publik, dan kinerja pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menjadi salah satu dasar normatif karena BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas.

Untuk memperkuat interpretasi data kuantitatif, wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data pendukung kepada pihak yang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan BLUD, seperti kepala Puskesmas, pengelola keuangan, bendahara, dan pengelola aset. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan fleksibilitas keuangan, proses pengambilan keputusan anggaran, penggunaan belanja modal, pemanfaatan aset, serta hambatan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dalam pengelolaan keuangan. Namun, wawancara tidak ditempatkan sebagai sumber utama pengujian hipotesis karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Berdasarkan dokumen artikel yang tersedia, belum terdapat informasi yang secara eksplisit menyatakan jumlah informan atau hasil wawancara, sehingga bagian tersebut perlu disesuaikan dengan pelaksanaan penelitian yang sebenarnya.

Instrumen penelitian utama berupa lembar dokumentasi atau format ekstraksi data yang digunakan untuk mencatat data dari laporan keuangan secara sistematis. Instrumen tersebut memuat indikator yang berkaitan dengan fleksibilitas keuangan BLUD, belanja modal, dan kinerja operasional. Fleksibilitas keuangan dapat dilihat dari kemampuan pengelolaan sumber daya keuangan sesuai kebutuhan operasional dan kewenangan BLUD, sedangkan belanja modal diukur berdasarkan nilai realisasi belanja modal dan perubahannya antarperiode. Kinerja operasional dapat dianalisis melalui indikator pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit operasional, efisiensi, serta indikator pelayanan yang tersedia. Data laporan menunjukkan bahwa pendapatan operasional tahun 2023 sebesar Rp1.975.320.969,30 dan beban operasional sebesar Rp2.420.614.306,41 sehingga menghasilkan defisit operasional Rp445.293.337,11.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengklasifikasian data, tabulasi, analisis deskriptif, dan analisis inferensial apabila jumlah observasi memenuhi persyaratan statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan fleksibilitas keuangan, belanja modal, dan kinerja operasional. Selanjutnya, apabila tersedia jumlah observasi yang memadai, pengujian pengaruh dapat dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan ($Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \varepsilon$ \), dengan Y sebagai kinerja operasional, X1 sebagai fleksibilitas keuangan BLUD, dan X2 sebagai belanja modal. Pengujian statistik dapat meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2), serta uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui pemeriksaan konsistensi data antardokumen serta penggunaan dokumen resmi sebagai sumber utama. Data mengenai belanja modal, misalnya, dibandingkan antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk memastikan konsistensi informasi. Demikian pula, perubahan nilai aset dan beban penyusutan dibandingkan dengan informasi dalam Neraca dan Laporan Operasional. Langkah ini penting karena peningkatan realisasi belanja modal belum secara otomatis menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan. Artikel menunjukkan bahwa nilai peralatan dan mesin meningkat dari Rp527.445.313,00 pada 2022 menjadi Rp1.000.825.070,00 pada 2023, sementara beban penyusutan meningkat dari Rp98.029.880,22 menjadi Rp194.926.469,01. Kondisi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut sebelum disimpulkan sebagai peningkatan kinerja pelayanan.

Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang objektif, sistematis, valid, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Penggunaan data laporan keuangan memungkinkan pengukuran variabel berdasarkan informasi kuantitatif yang terdokumentasi, sedangkan studi pustaka memberikan dasar konseptual bagi penentuan indikator penelitian. Analisis statistik digunakan untuk menguji hubungan antara fleksibilitas keuangan BLUD, belanja modal, dan kinerja operasional apabila jumlah observasi memadai. Perlu ditegaskan bahwa apabila penelitian hanya menggunakan dua tahun data tahunan, yaitu 2022 dan 2023, regresi linear berganda tidak tepat dilakukan karena jumlah observasinya terlalu sedikit. Dalam kondisi tersebut, analisis yang lebih tepat adalah analisis deskriptif-komparatif dan analisis rasio keuangan, atau penelitian perlu diperluas dengan data bulanan/triwulanan atau beberapa Puskesmas agar analisis inferensial dapat dilakukan secara memadai. Pendekatan ini juga sesuai dengan permasalahan artikel yang menegaskan bahwa tingginya realisasi belanja belum cukup untuk membuktikan peningkatan kinerja operasional pelayanan kesehatan.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerja Puskesmas mencakup Kelurahan Klojen, Rampal Celaket, dan Samaan. Berdasarkan laporan tahun 2023, jumlah penduduk wilayah kerja mencapai 22.286 jiwa, terdiri atas 10.731 laki-laki dan 11.555 perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Puskesmas memiliki cakupan pelayanan masyarakat yang cukup besar sehingga pengelolaan keuangan dan ketersediaan sumber daya menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan.

Kondisi Pendapatan Dan Belanja.

Hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Puskesmas pada 2023 mencapai Rp1.090.821.330,30 dari anggaran Rp1.251.870.735,15 atau sekitar 87,14%. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp1.516.160.554,00 dari anggaran Rp1.734.729.877,00 atau 87,40%. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tingkat realisasi pendapatan dan belanja berada pada kisaran 87%, tetapi belum menunjukkan bahwa seluruh sumber daya yang dibelanjakan secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja operasional.

Realisasi Belanja Modal.

Belanja modal menunjukkan perubahan yang cukup besar antara 2022 dan 2023. Pada 2023, anggaran belanja modal sebesar Rp58.744.135,00 dengan realisasi Rp57.947.635,00 atau 98,64%. Pada 2022, realisasi belanja modal hanya Rp11.000.000,00. Dengan demikian, terjadi peningkatan nominal realisasi belanja modal sebesar Rp46.947.635,00 atau sekitar 426,80% dibandingkan tahun 2022. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan investasi sumber daya/aset pada tahun 2023. Namun, tingginya persentase realisasi belanja modal belum dapat digunakan sebagai bukti tunggal bahwa kualitas pelayanan meningkat.

Perkembangan Aset Dan Penyusutan.

Perubahan belanja modal juga terlihat pada perkembangan aset tetap. Nilai peralatan dan mesin meningkat dari Rp527.445.313,00 pada 2022 menjadi Rp1.000.825.070,00 pada 2023. Pada periode yang sama, beban penyusutan aset tetap meningkat dari Rp98.029.880,22 menjadi Rp194.926.469,01. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi aset diikuti dengan meningkatnya beban penyusutan. Dengan demikian, investasi aset tidak hanya menghasilkan tambahan kapasitas aset, tetapi juga menimbulkan konsekuensi biaya akuntansi dan kebutuhan pemeliharaan dalam periode berikutnya.

Kinerja Operasional Berdasarkan Laporan Operasional.

Hasil analisis Laporan Operasional menunjukkan bahwa pada 2023 Puskesmas memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp1.975.320.969,30 dan menanggung beban operasional sebesar Rp2.420.614.306,41. Selisih antara pendapatan dan beban tersebut menghasilkan defisit operasional sebesar Rp445.293.337,11. Pada 2022, defisit operasional mencapai Rp1.417.963.078,20. Dengan demikian, secara nominal defisit operasional mengalami penurunan sebesar Rp972.669.741,09 atau sekitar 68,59%. Meskipun demikian, Puskesmas masih mencatat kondisi defisit sehingga peningkatan belanja modal belum dapat dikatakan sepenuhnya menghasilkan kinerja operasional yang positif.

Ringkasan Temuan Penelitian.

Secara deskriptif, terdapat tiga temuan utama. Pertama, realisasi belanja modal meningkat secara signifikan dari Rp11.000.000,00 pada 2022 menjadi Rp57.947.635,00 pada 2023. Kedua, nilai

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

peralatan dan mesin meningkat sejalan dengan meningkatnya investasi aset. Ketiga, defisit operasional mengalami penurunan dari Rp1,418 miliar menjadi Rp445,293 juta, tetapi belum berubah menjadi surplus. Dengan demikian, data menunjukkan adanya perbaikan kondisi operasional secara finansial, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan adanya pengaruh kausal fleksibilitas keuangan dan belanja modal terhadap mutu pelayanan kesehatan.

Analisis Fleksibilitas Keuangan Blud.

Fleksibilitas keuangan BLUD dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan unit pelayanan untuk memanfaatkan sumber daya keuangan sesuai kebutuhan operasional dalam ruang kewenangan yang diberikan oleh regulasi. Data menunjukkan bahwa Puskesmas mampu merealisasikan belanja modal sebesar 98,64% dari anggaran pada 2023. Tingginya realisasi tersebut dapat menjadi indikasi adanya kemampuan untuk mengimplementasikan anggaran investasi yang telah direncanakan. Namun, fleksibilitas keuangan tidak dapat hanya diukur dari persentase penyerapan anggaran. Fleksibilitas juga berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan sumber daya terhadap kebutuhan pelayanan secara efisien, produktif, dan akuntabel.

Analisis Hubungan Belanja Modal Dan Kinerja Operasional.

Peningkatan belanja modal dari Rp11 juta menjadi Rp57,948 juta bersamaan dengan peningkatan nilai aset dan penurunan defisit operasional. Pola tersebut memberikan indikasi bahwa peningkatan investasi aset terjadi bersamaan dengan membaiknya kondisi operasional. Namun, berdasarkan data yang tersedia, hubungan tersebut masih bersifat deskriptif, bukan hubungan kausal yang telah dibuktikan melalui pengujian statistik. Hal ini penting karena peningkatan belanja modal dapat meningkatkan kapasitas pelayanan apabila aset benar-benar digunakan secara produktif, tetapi dapat pula meningkatkan beban apabila aset kurang dimanfaatkan atau tidak diikuti pemeliharaan yang memadai. Artikel menegaskan bahwa realisasi anggaran saja belum cukup untuk memastikan peningkatan kinerja pelayanan.

Keterkaitan Dengan Tujuan Penelitian.

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan BLUD dan belanja modal memiliki relevansi terhadap keberlanjutan operasional Puskesmas. Peningkatan belanja modal pada 2023 menunjukkan adanya penguatan investasi aset, sedangkan penurunan defisit operasional menunjukkan adanya perbaikan kondisi keuangan operasional. Akan tetapi, karena data yang tersedia hanya menunjukkan perbandingan dua tahun, hasil penelitian belum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa fleksibilitas keuangan dan belanja modal secara statistik berpengaruh terhadap kinerja operasional. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa terdapat perubahan yang searah dan indikasi keterkaitan yang perlu diuji menggunakan observasi yang lebih panjang.

Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa Puskesmas Rampal Celaket mengalami peningkatan realisasi belanja modal pada 2023, peningkatan nilai peralatan dan mesin, serta penurunan defisit operasional dibandingkan 2022. Namun, kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan peningkatan beban penyusutan dan masih adanya defisit operasional. Oleh karena itu, temuan utama penelitian adalah bahwa peningkatan investasi aset dan kemampuan merealisasikan belanja belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Pengukuran kinerja perlu mempertimbangkan efisiensi penggunaan aset, pemanfaatan fasilitas, kualitas pelayanan, produktivitas, serta manfaat investasi terhadap masyarakat.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan realisasi belanja modal pada Puskesmas Rampal Celaket belum dapat dipahami hanya sebagai keberhasilan penyerapan anggaran. Realisasi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

belanja modal mencapai 98,64% pada 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp11 juta. Dalam perspektif manajemen publik, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghabiskan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan mengubah sumber daya tersebut menjadi hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep New Public Management yang menekankan efisiensi, efektivitas, kinerja, dan orientasi pada hasil dalam pengelolaan organisasi publik (Hood, 1991).

Dari perspektif fleksibilitas keuangan BLUD, tingginya realisasi belanja modal menunjukkan bahwa Puskesmas memiliki ruang untuk mengalokasikan sumber daya keuangan bagi kebutuhan investasi. Hal tersebut sejalan dengan semangat Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang memberikan fleksibilitas kepada BLUD dalam pengelolaan keuangan dengan tetap mempertahankan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas. Fleksibilitas seharusnya memungkinkan organisasi pelayanan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat. Dengan demikian, fleksibilitas keuangan memiliki nilai strategis apabila digunakan untuk membiayai kebutuhan yang benar-benar meningkatkan kapasitas pelayanan.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya peningkatan nilai peralatan dan mesin dari Rp527,445 juta menjadi Rp1,001 miliar. Kondisi tersebut mengindikasikan bertambahnya kapasitas aset Puskesmas. Secara teoritis, peningkatan aset produktif dapat mendukung kapasitas pelayanan karena organisasi memiliki sumber daya fisik yang lebih besar untuk melaksanakan kegiatan operasional. Namun, aset hanya memberikan manfaat apabila tersedia, berfungsi, digunakan secara optimal, dan dipelihara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan nilai aset tidak dapat langsung disamakan dengan peningkatan produktivitas pelayanan.

Penurunan defisit operasional dari Rp1,418 miliar menjadi Rp445,293 juta memberikan indikasi positif. Secara nominal, defisit berkurang sekitar 68,59%. Perbaikan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi keuangan operasional yang lebih baik pada 2023 dibandingkan 2022. Akan tetapi, defisit masih terjadi karena beban operasional lebih besar daripada pendapatan operasional. Dengan demikian, peningkatan efisiensi atau kemampuan pembiayaan operasional masih menjadi persoalan penting. Temuan ini memperkuat pandangan Mardiasmo (2018) bahwa pengelolaan keuangan sektor publik harus dinilai berdasarkan aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran.

Peningkatan belanja modal juga harus dilihat bersama peningkatan beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat dari Rp98,030 juta pada 2022 menjadi Rp194,926 juta pada 2023. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi akuntansi dari meningkatnya aset tetap yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Dari perspektif manajemen keuangan, investasi aset menghasilkan manfaat ekonomi atau pelayanan dalam jangka lebih panjang, tetapi juga menimbulkan konsekuensi biaya selama masa manfaat aset. Oleh sebab itu, keputusan investasi Puskesmas harus mempertimbangkan biaya siklus hidup aset, pemeliharaan, utilisasi, dan manfaat pelayanan, bukan hanya harga perolehan.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan *teori public value* yang dikemukakan Moore (1995), yaitu bahwa organisasi publik seharusnya menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks Puskesmas, keberhasilan investasi tidak cukup ditunjukkan oleh bertambahnya aset atau tingginya realisasi anggaran. Nilai publik akan lebih terlihat apabila investasi tersebut menghasilkan peningkatan akses, kualitas, kecepatan, efektivitas, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, belanja modal seharusnya diposisikan sebagai instrumen penciptaan nilai publik, bukan sekadar kategori pengeluaran dalam laporan keuangan.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kinerja keuangan dan kinerja pelayanan. Secara finansial, defisit operasional menurun; secara aset, nilai peralatan dan mesin meningkat; dan secara anggaran, realisasi belanja modal sangat tinggi. Namun, data tersebut belum menunjukkan apakah waktu tunggu pasien menurun, cakupan pelayanan meningkat, kepuasan pasien membaik, produktivitas tenaga kesehatan meningkat, atau kualitas layanan menjadi lebih baik.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Kesenjangan tersebut merupakan aspek penting dalam penelitian karena organisasi pelayanan publik tidak dapat menilai keberhasilan hanya berdasarkan indikator keuangan.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan fleksibilitas keuangan BLUD dan belanja modal dalam satu kerangka pembahasan kinerja operasional Puskesmas. Penelitian tidak memandang belanja modal sebagai variabel keuangan yang berdiri sendiri, tetapi menghubungkannya dengan kapasitas operasional organisasi pelayanan kesehatan. Pendekatan tersebut memperluas pemahaman bahwa efektivitas BLUD tidak hanya berkaitan dengan fleksibilitas penggunaan anggaran, tetapi juga dengan kemampuan organisasi mengonversi fleksibilitas tersebut menjadi kapasitas pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pengelola Puskesmas dan pemerintah daerah. Pertama, peningkatan belanja modal perlu disertai analisis kebutuhan dan pemanfaatan aset. Kedua, setiap investasi harus memiliki indikator manfaat yang dapat diukur, misalnya peningkatan kapasitas pelayanan, efisiensi waktu pelayanan, atau peningkatan cakupan pasien. Ketiga, peningkatan aset perlu diikuti perencanaan pemeliharaan agar tidak berubah menjadi beban yang mengurangi efisiensi operasional. Keempat, evaluasi BLUD perlu menggabungkan indikator keuangan dengan indikator pelayanan sehingga keputusan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan.

Dengan demikian, novelty penelitian terletak pada upaya menghubungkan fleksibilitas keuangan BLUD dan belanja modal dengan kinerja operasional pelayanan kesehatan pada tingkat Puskesmas, serta menunjukkan bahwa tingginya realisasi anggaran dan peningkatan aset belum otomatis berarti peningkatan kinerja pelayanan. Temuan ini memberikan pesan penting bahwa keberhasilan pengelolaan BLUD harus dilihat dari kemampuan mengubah fleksibilitas dan sumber daya keuangan menjadi nilai pelayanan publik. Namun, untuk memperkuat kontribusi empiris, penelitian berikutnya perlu menggunakan data bulanan atau triwulanan dalam beberapa tahun, atau melibatkan beberapa Puskesmas, sehingga pengaruh fleksibilitas keuangan dan belanja modal dapat diuji secara statistik dengan jumlah observasi yang memadai. Dengan cara tersebut, hubungan yang saat ini baru terlihat secara deskriptif dapat diuji secara empiris dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan fleksibilitas keuangan BLUD dan belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang. Peningkatan pemanfaatan belanja modal dan penguatan sumber daya aset berjalan seiring dengan membaiknya kondisi operasional, tetapi belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa peningkatan belanja secara langsung menyebabkan peningkatan kinerja pelayanan. Kinerja Puskesmas perlu dilihat secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pengelolaan keuangan, pemanfaatan aset, efisiensi operasional, dan manfaat yang diterima masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman bahwa fleksibilitas keuangan BLUD dan belanja modal perlu ditempatkan dalam kerangka pencapaian kinerja organisasi publik dan penciptaan nilai pelayanan. Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi bagi pengelola Puskesmas dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, serta evaluasi belanja modal agar benar-benar mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, data yang lebih terperinci, serta indikator kinerja pelayanan yang lebih beragam agar hubungan antara fleksibilitas keuangan, belanja modal, dan kinerja operasional dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Bagi Puskesmas dan pemerintah daerah, evaluasi pengelolaan BLUD sebaiknya tidak

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatan aset, efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, H. J., & Sujai, M. (2024). Financial management strategy of Regional Public Service Agency (BLUD) to increase quality in health services: Case study West Langsa Public Health Center (Puskesmas). *Public Sector International Conference* 2024. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PSIC2024/article/view/2810

Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi empiris kabupaten dan kota se-Eks Karesidenan Pekalongan periode 2016–2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165

Atmoko, C. A., & Khairudin. (2022). Dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295

Bahri, F., Azlina, N., & Nasir, A. (2024). Determinan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum: Dimoderasi oleh sistem pengendalian internal. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 5(3), 423–446. https://doi.org/10.31258/current.5.3.423-446

Balishna, M., Andriani, R., & Efawati, Y. (2025). Analysis of the implementation of financial management patterns of Regional Public Service Agencies (PPK-BLUD) at Tanjungsari Health Center. *International Journal Administration, Business & Organization*, 6(2), 148–161. https://doi.org/10.61242/ijabo.25.497

Diskamara, E. R., & Hidayat, B. (2023). Gambaran kinerja Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Scoping review. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8112–8121. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1350

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2023.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2024.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2025.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kristanto, P. F., & Lisdiono, P. (2025). Risk management practices in regional public hospitals: An analysis of BLUD financial management in accordance with ministerial regulations. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(2). https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i02.p08

Padang, N. N., & Padang, W. S. (2024). Pengaruh dana perimbangan, belanja modal dan fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 73–86. https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3524

Putri, N. P. A. S., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017–2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(1), 133–147. https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62916

Rahmadini, D., Indriani, R., & Febriana, N. (2024). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2783–2795. https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2069

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Rahmiyati, A. L. (2023). Analysis of the financial management of the Sukawarna public health center before and after becoming a regional public service agency. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(4). https://doi.org/10.30604/jika.v8i4.2251

Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan SILPA dalam pengaruhnya kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi, 17*(1), 38–47. https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6737

Sambodo, N. P., Bonfrer, I., Sparrow, R., Pradhan, M., & van Doorslaer, E. (2023). Effects of performance-based capitation payment on the use of public primary health care services in Indonesia. *Social Science & Medicine,* 327, Article 115921. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115921

Sugiyarsih, S. (2024). Financial management flexibility and public service performance in Indonesian public hospitals. *International Journal of Science Education and Cultural Studies*, 3(2). https://doi.org/10.58291/ijsecs.v3i2.601

World Health Organization. (2024). *Global spending on health: Emerging from the pandemic*. World Health Organization.

World Health Organization, & World Bank. (2023). *Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report.* World Health Organization.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license